



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG**

Jalan Letjen. s. Parman No. 109 Fax. (0534) 32651 Ketapang - Kalbar

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Kata Pengantar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ketapang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 95 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka kinerja (performance) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mutlak diperlukan guna membangun persepsi dan komitmen di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam rangka peningkatan kinerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang periode 2021-2026.

Rencana Kerja Tahun 2024 sangat penting sebagai upaya pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan karena akan diungkapkan didalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang pada dasarnya adalah indikator sasaran (Outcomes) pada setiap kegiatan akan dapat mendukung pencapaian sasaran atau apakah Outcomes sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila telah sesuai maka langkah selanjutnya adalah penetapan besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun berjalan.

Sehingga kedepan dengan adanya Rencana Kerja yang akurat sehingga dapat memberikan arah atas apa yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang guna pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ketapang.

Ketapang, Februari 2023





Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas PMPTSP	8
2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja.....	9
2.1.2 Capaian Analisa Kinerja.....	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tuga dan Fungsi.....	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.1.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PMPTSP.....	26
3.1.2. Tujuan Strategis	27
3.1.3. Sasaran Strategis	28
3.2 Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN :	
TABEL 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d tahun 2022	
TABEL 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Kab. Ketapang	
TABEL 2.3 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	
TABEL 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan	
TABEL 3.1 : Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah Tahun 2023	
TABEL 4.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Perkiraan Maju 2024	

**BAB
I****PENDAHULUAN****A. LATAR BELAKANG**

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Ketapang. Peraturan Daerah tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Agar tugas tugas pokok dan fungsi yang diberikan dapat terlaksana dengan baik maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sebagai penjabaran dari Perencanaan Strategis maka disusun Rencana Kerja (Renja) tahunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Tahun 2024 sangat penting bagi upaya pencapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan apakah indikator sasaran (*outcomes*) pada setiap kegiatan akan dapat mendukung pencapaian sasaran atau apakah *outcomes* sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya adalah penetapan besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun berjalan.

Agenda Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan merupakan langkah strategis yang perlu didukung oleh seluruh domain pembangunan baik itu Pemerintah Daerah, Tingkat Propinsi dan Pusat, Dunia Usaha maupun Masyarakat. Secara terfokus percepatan pembangunan untuk penentuan prioritas pembangunan kedepan dilakukan dengan mempertimbangkan secara seksama upaya pencapaian Visi Kepala Daerah Kabupaten Ketapang yaitu :

“ MELANJUTKAN KETAPANG MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA“

Maju, mengandung arti berjalan (bergerak) ke muka, menjadi lebih baik, membawa kedalam keadaan lebih baik untuk terciptanya kemajuan tentu perlu adanya pembangunan yang menyeluruh disegala aspek kehidupan. Dalam konteks ini kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya penyediaan infrastruktdasar bagi seluruh masyarakat kabupaten Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat.

Sejahtera, mengandung makna aman, sentosa, damai, makmur dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Sejahtera masyarakat adalah kata kunci dan indikator keberhasilan pembangunan, dalam konteks ini kesejahteraan memiliki dimensi :

- 1) Kesejahteraan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan,
- 2) Kesejahteraan yang betul-betul mampu mendorong terbentuknya pondasi ekonomi yang kuat dan berkesinambungan,
- 3) Kesejahteraan yang mampu mengurangi jurang kesenjangan antara miskin dan kaya,
- 4) Kesejahteraan yang mampu mengantarkan pada kondisi masyarakat yang semakin beradab.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan **Misi** sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang handal, Bersih, Terpercaya dan berwibawa Dalam Pelayanan Publik;

2. Melanjutkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur;
3. Pembangunan Sumberdaya Manusia yang memiliki daya saing;
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan;
5. Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat;
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Seluruh Masyarakat Ketapang

B. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang – undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RANWAL RENJA) DPMPTSP Kabupaten Ketapang tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundangan nomor 1 tahun 2020 tentang Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas system keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi ,dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2008 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ketapang Nomor 44).
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ketapang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024 adalah agar selaras dengan rencana strategis dengan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang;

- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang;

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024. Adapun tujuan disusunnya Renja adalah untuk :

- a. Memberikan informasi rencana program kegiatan tahunan; yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024;
- b. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- c. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024, adalah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KETAPANG TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang Perhubungan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN

**BAB
II****EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
KERJA TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan leading sektor penyelenggaraan investasi dan pelayanan perizinan kepada masyarakat Kabupaten Ketapang. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyiapkan penyederhanaan pengurusan perizinan secara online sehingga dapat memangkas waktu pembuatan perizinan jika dilakukan secara manual. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2024 adalah Penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Kerja juga merupakan alat ukur untuk menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang selama tahun 2023 dan perkiraan target sampai tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Secara umum indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja tahunan adalah input, output, dan outcome sementara benefit dan impact lebih digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pada jangka menengah dan jangka panjang. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program / kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2021 yaitu Peningkatan Realisasi Penanaman Modal sebesar 19,2 % dengan efisiensi anggaran sebesar 91,63 % atau Rp. 5.454.513.449,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.952.797.211,- sedangkan untuk tahun 2022 dapat dicapai dengan sangat baik yaitu Peningkatan Realisasi

Penanaman Modal sebesar 48.41 % dari target yang ditetapkan sebesar 2.04 % dengan efisiensi anggaran sebesar 89.98 % atau Rp. 6.902.073.236,- dari pagu anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 7.670.429.632,-

Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Ketapang TA. 2021 dan 2022

Uraian	2021	2022
	Belanja Daerah	Belanja Daerah
Pagu dana	5.952.797.211,00	7.670.429.632,00
Realisasi	5.454.513.449,00	6.902.073.236,00
Saldo Anggaran	498.283.762,00	768.356.396,00
Prosentase	91.63	89,98

Sedangkan untuk pencapaian hasil realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN / PMA

Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN / PMA tahun 2022 sebesar 48.41 % dari yang ditargetkan sebesar 2.04%, Dengan Capaian Kinerja \geq 100%

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan

Angka Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2022 sebesar 98.61 dari target yang ditetapkan sebesar 91

3. Nilai RB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2022 sebesar 28.72 dari target yang ditetapkan sebesar 25.5

Untuk melihat bagaimana evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sampai dengan semester IV tahun 2022 (realisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2022) dapat dilihat pada **Table 2.1** *Terlampir*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Investasi merupakan faktor penting bagi proses pembangunan ekonomi berkelanjutan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa disemua sektor ekonomi, dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya menciptakan permintaan di pasar, dan jika pasar berkembang maka kegiatan volume produksi, kesempatan kerja dan pendapatan di dalam negeri meningkat maka terciptalah pertumbuhan ekonomi. Jadi membangun kinerja perekonomian suatu negara dibutuhkan akumulasi kapital, akumulasi modal sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk membangun kinerja perekonomiannya. Oleh karena itu setiap negara berusaha untuk menciptakan iklim perekonomiannya dalam rangka mendorong terciptanya akumulasi modal guna pembangunan perekonomian dan akumulasi modal berupa investasi dapat berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan investasi pemerintah menetapkan peningkatan investasi sebagai salah satu program prioritas nasional dan urusan penanaman modal menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam upaya memacu investasi sebagai salah satu sumber dana pembangunan membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 95

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tugas membantu Bupati Ketapang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas sekretariat masing-masing.

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan selama ini memberikan hasil yang positif antara lain : semakin mudahnya pembuatan perizinan karena dilakukan secara online sehingga lebih transparan dan memenuhi azas keterbukaan, pembuatan izin pada saat ini lebih cepat karena waktu proses yang dilakukan secara manual telah dipangkas sehingga hemat waktu, biaya dan mempermudah administrasi. Dampak yang muncul adalah meningkatnya komitmen masyarakat dalam pembuatan izin yang pada akhirnya bertujuan untuk memudahkan proses investasi yang masuk di Kabupaten Ketapang.

Untuk melaksanakan fungsi dan memberikan hasil yang positif kepada masyarakat Kabupaten Ketapang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan daerah Kabupaten Ketapang. Peraturan Daerah tersebut ditindak Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat lanjuati dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sesuai dengan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut :

Dinas

1) Dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas;
 - e. Pelaksanaan administrasi di Lingkungan Dinas ; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan.

Sekretariat Dinas:

- 1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- 2) Sekretariat dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas;
- 3) Sekretariat dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Sekretariat;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di lingkungan Sekretariat;
 - c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset;

- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset dilingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
- f. Penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan

Sekretariat Dinas terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan**
- b. Kelompok Jabatan Fungsional**

Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas.

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan dinas.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam tugas – tugas urusan umum dan kepegawaian Dinas dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana Kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - c. Melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. Menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
 - e. Menghimpun dokumen kepegawaian;

- f. Menyiapkan dan mengusulkan pengembangan pegawai;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- h. Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;
- i. Melaksanakan Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- j. Menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur, dan survey kepuasan masyarakat;
- k. Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- l. Melaksanakan reformasi birokrasi;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan;

Bidang Pengembangan Penanaman Modal

Bidang pengembangan penanaman modal dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

1. Bidang pengembangan penanaman modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan penanaman modal serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pengembangan Penanaman Modal.
2. Bidang Pengembangan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan penanaman modal;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan pengembangan penanaman modal;
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pengembangan penanaman modal;

- d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan penanaman modal;
 - e. Pembinaan administrasi dan aparatur pada pengembangan penanaman modal;
 - f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan penanaman modal; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyusun rencana, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Penanaman Modal. Susunan organisasi Bidang Pengembangan Penanaman Modal terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal

Bidang data dan pengendalian penanaman modal dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

- (1) Bidang data dan pengendalian penanaman modal mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal.
- (2) Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal dalam menyelenggarakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - b. penyusunan program dan kegiatan di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;

- d. penyelenggaraan kegiatan data dan pengendalian penanaman modal;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
 - f. pembinaan administrasi dan aparatur di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - g. pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman modal; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyusun rencana, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal. Susunan organisasi Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

Bidang Pelayanan perizinan terpadu dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

- (1) Bidang pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;

- b. Penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - e. Pembinaan administrasi dan aparatur pada bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - f. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan perizinan terpadu;
 - g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala bidang pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyusun rencana, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu. Susunan organisasi Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Jenjang keahlian dan keterampilan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pengawas dan atau pejabat administrator sesuai bidang tugasnya.
3. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.

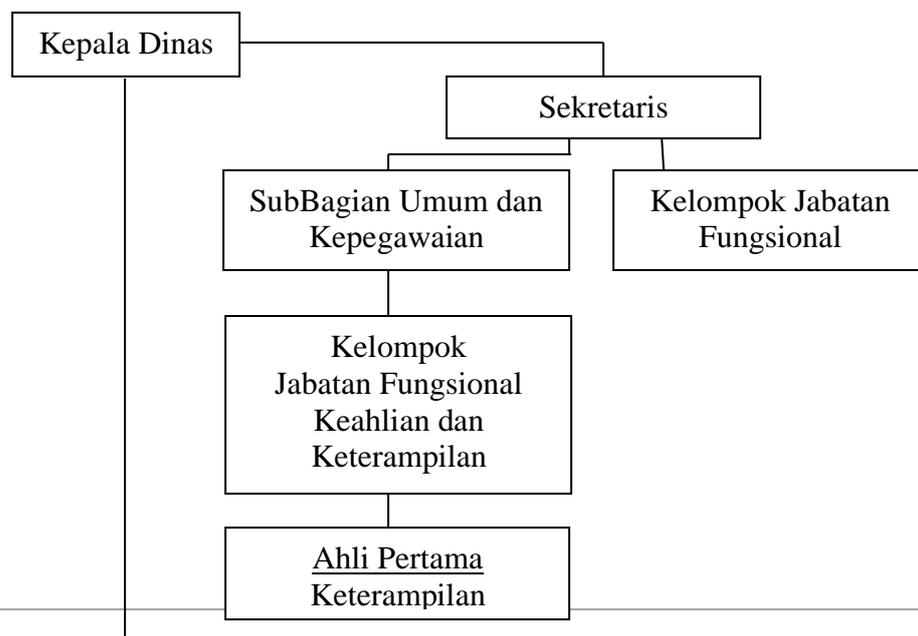
4. Subkoordinator melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi masing-masing pengelompokan fungsi.
5. Subkoordinator ditetapkan oleh bupati.
6. Nomenklatur jabatan subkoordinator dan pembagian tugas diusulkan oleh kepala dinas.
7. Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai bidang tugas dan fungsi sebagai subkoordinator, Bupati dapat menetapkan pejabat pelaksana dengan pangkat tertinggi di unit kerja sesuai kualifikasi pendidikan.

Struktur Organisasi

Berikut dibawah ini adalah bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang





Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan. Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- **Lingkungan Internal meliputi :**

1. Kekuatan (Strength)

- Kapasitas kelembagaan yang terus berkembang dari kantor menjadi dinas.
- Heterogenitas budaya masyarakat yang didukung dengan suasana yang kondusif
- Memiliki kewenangan untuk pengolahan perizinan dan non perizinan
- Adanya kemauan yang kuat dari personil untuk maju dan berkembang.
- Adanya Komitmen Pimpinan
- Ketersediaan Dana.

2. Kelemahan (Weakness)

- Kondisi geografis yang cukup luas sehingga belum maksimal untuk dikembangkan
- Belum tertatanya manajemen perencanaan serta terbatasnya sumber pendanaan yang berbasis kinerja
- Terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional

- Koordinasi yang belum maksimal

- **Lingkungan eksternal meliputi :**

1. Peluang (opportunities)

- Tuntutan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima dan transparan sangat tinggi.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sumber pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi.
- Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang
- Adanya dukungan dari Kepala Daerah terpilih
- Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi dinas.

2. Ancaman / Tantangan (Threats)

- Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur / regulasi yang baku selama proses transisi pembentukan organisasi
- Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan non perizinan
- Masih rendahnya pengetahuan aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku.

Upaya untuk meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Ketapang masih dihadapkan pada beberapa kendala dan permasalahan baik internal maupun eksternal. Secara internal permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketidaksiapan beberapa objek investasi untuk ditawarkan kepada investor
2. Potensi penanaman modal di Kabupaten Ketapang belum banyak dikenal oleh investor baik dalam dan luar negeri

3. Luas wilayah pelayanan dan keterbatasan SKPD serta regulasi belum sempurna sehingga belum maksimalnya pelayanan perizinan di daerah pedalaman yang memerlukan langsung ke kecamatan-kecamatan sehingga masih banyak pengusaha lokal tidak memiliki izin dan masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan izinnya.
4. Terbatasnya transportasi dan sarana penunjang untuk menjangkau daerah kecamatan yang jaraknya jauh dari ibukota kabupaten.

Sementara itu permasalahan secara eksternal atau diluar kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang antara lain Ketersediaan infrastruktur penunjang terutama akses jalan dan jaringan listrik serta Jaringan Internet yang masih sangat sedikit di Daerah-daerah pedalaman.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kabupaten.

Program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rancangan Awal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitive untuk diajukan menjadi rencana kerja. Review Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlihat pada tabel dibawah ini :

Untuk melihat bagaimana review / evaluasi terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dapat dilihat pada **table 2.4**
Terlampir

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai hasil usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan Kabupaten Ketapang. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk banyak tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. Pada umumnya kebutuhan masyarakat yang tertampung pada musrenbang telah terealisasi berdasarkan skala prioritas. Ada pun data usulan dari hasil Musrenbang tersebut ada pada tabel lampiran dibawah ini **Tabel 2.5** (table usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022 Kab. Ketapang

**BAB
III****TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dengan program dan kegiatan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas, adapun Visi dari BKPM-RI selama lima tahun kedepan adalah “ **BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden :” Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.**”

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden point 2 dan point 8 dari 9 misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

Point 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;

Point 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;

Dari Renstra BKPM-RI 2020-2024 baik isi visi maupun misi yang ada dijadikan acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam penyusunan visi dan misi dinas yang mana merupakan penjabaran dari visi misi bupati terpilih periode 2021-2026. Mengingat apa yang menjadi permasalahan yang ada di Kabupaten Ketapang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan nasional. Untuk itu antara visi dan misi

kementerian/lembaga, BKPM Propinsi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang harus selaras dan sinergis dalam menjawab permasalahan-permasalahan melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan melalui dukungan anggaran yang tersedia.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang

Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang maka disusun visi yang menunjukkan jati diri dan fungsinya dalam mewujudkan Kabupaten Ketapang sebagai daerah tujuan investasi, adapun Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan Prima yang Profesional”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih, memperhatikan masukan pihak - pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan /penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang akan dicapai untuk masa yang akan datang maka ditetapkan 6 (enam) misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yaitu :

1. Meningkatkan tertib administrasi
2. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis informasi teknologi

3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pelaksana pelayanan
4. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Melaksanakan pengolahan data untuk tersedianya arsip dokumen perizinan yang otentik
6. Meningkatkan kualitas pelayanan yang (cermat) cepat, ramah, mudah, adil dan transparan.

Dari ke 6 (Enam) misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yang menjadi misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas yaitu misi 5 (lima) Memperkokoh Landasan Perekonomian Masyarakat.

3.1.2 Tujuan Strategis

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara bersih dan baik (Good Government)
2. Mewujudkan kualitas pelayanan secara profesional dan handal

3. Mewujudkan / meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan, khususnya dalam bidang perizinan

3.1.3 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstra-nya.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi PMDN / PMA
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- Nilai RB Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Secara spesifik sasaran diatas dapat dijabarkan atau diperjelas sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang guna memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan tidak berbelit-belit.
2. Pelayanan satu pintu harus didukung oleh sistem dan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) yang memadai.
3. Meningkatkan profesionalisme dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
4. Menambah jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan.

3.2 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan Kegiatan sebagai implementai dari Program yang dibuat sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Untuk menjabarkan beberapa program perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok. Untuk lebih jelasnya mengenai program dan kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Rencana kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Ketapang untuk tahun 2024

secara rinci masing-masing program / kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran / Triwulan / dan Semesteran SKPD

- 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 1.3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 1.3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.4.3 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
- 1.4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Mebel
 - 1.5.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan.
 - 1.7.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.7.5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 2.1. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 2.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- 2.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
 - 2.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
 - 2.2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

- 3.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 3.1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
 - 3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- 4.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 4.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 4.1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

- 4.1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 5.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - 5.1.1 Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5.1.2 Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5.1.3 Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 - 6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Untuk Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di daftar lampiran sebagaimana yang tertuang didalam Tabel **4.1** (Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju tahun 2025)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tugas-tugas umum pemerintahan yang berupa pelayanan publik belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya. Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri, dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia. Untuk lebih jelas maka indikator kinerja seperti yang tercantum didalam halaman lampiran Matrik Rencana Kerja.

Untuk dapat mendukung Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.756.065.761,- yang terdiri dari 6 program dan 13 Kegiatan dengan prakiraan maju Tahun 2024 sebesar Rp.9.134.808.480,- (Data terlampir didalam **Tabel . 4.1**)

**BAB
V*****PENUTUP***

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024 merupakan suatu dokumen yang disusun dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah Perencanaan Tahunan dan turunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran sehingga dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun Anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merencanakan 6 (enam) program, 13 (Tiga Belas Kegiatan) dan 40 (empat puluh) Sub Kegiatan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Ketapang



Drs. MARWANNOR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 200003 1 003

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)
TAHUN 2024**

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	RENCANA PEMENUHAN DAN SUMBER DANA			Keterangan
						APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPMPTSP	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Administrasi Pemerintahan	Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi	100%			5.870.902.600	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ketapang	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	100%	-	-	76.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	-	-	8.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	-	-	3.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	-	-	-	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPTSP	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	-	-	3.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	-	-	2.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dok	-	-	25.000.000	

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	RENCANA PEMENUHAN DAN SUMBER DANA			Keterangan
						APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	-	-	35.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ketapang	Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu		-	-	4.533.502.600	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPPTSP	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	-	-	4.517.502.600	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPPTSP	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	-	8.000.000	
10	Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	DPMPPTSP	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	-	-	8.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ketapang	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	35.000.000	
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPPTSP	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPPTSP	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	-	5.000.000	
13	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	DPMPPTSP	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	DPMPPTSP	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	-	-	30.000.000	

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	RENCANA PEMENUHAN DAN SUMBER DANA			Keterangan
						APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPPTSP	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ketapang	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	-	385.000.000	
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	15.000.000	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	90.000.000	
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPPTSP	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	30.000.000	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMPPTSP	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPPTSP	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	250.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPPTSP	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ketapang	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				160.000.000	
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPPTSP	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	
21	Pengadaan Mebel	DPMPPTSP	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket			60.000.000	
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPPTSP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			70.000.000	
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPPTSP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	30.000.000	

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	RENCANA PEMENUHAN DAN SUMBER DANA			Keterangan
						APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPPTSP	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ketapang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	503.400.000	
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPPTSP	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	3.000.000	
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPPTSP	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	-	200.000.000	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	300.400.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPPTSP	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Ketapang	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	178.000.000	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPPTSP	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	-	-	100.000.000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPPTSP	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	-	-	4.000.000	
28	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPPTSP	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	50.000.000	
29	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPPTSP	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	-	-	15.000.000	

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	RENCANA PEMENUHAN DAN SUMBER DANA			Keterangan
						APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
30	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	-	-	9.000.000	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP		Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan				239.000.000	
8	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPMPTSP		Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal		-	-	89.000.000	
31	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	-	-	39.000.000	
32	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten	DPMPTSP	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	5 Kegiatan Usaha			50.000.000	
9	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	DPMPTSP		Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi				150.000.000	
33	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	DPMPTSP	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	-	-	70.000.000	
34	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	DPMPTSP	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	80.000.000	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP		Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah				710.000.000	
10	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPMPTSP		Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal		-	-	710.000.000	
35	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	DPMPTSP	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	1 Dokumen			600.000.000	

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	RENCANA PEMENUHAN DAN SUMBER DANA			Keterangan
						APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
36	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	DPMPPTSP	Tersusunnya Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	110.000.000	
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP		Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal		-	-	430.000.000	
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPMPPTSP		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu		-	-	430.000.000	
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	DPMPPTSP	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	5 Kegiatan Usaha	-	-	30.000.000	
38	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPPTSP	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha / Mall Pelayanan Publik	-	-	150.000.000	
39	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPPTSP	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis resiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis resiko	5 Orang	-	-	100.000.000	
40	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko	DPMPPTSP	Terlaksananya Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan Perizinan Berusaha berbasis resiko	10 Pelaku Usaha	-	-	150.000.000	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP		1.Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel				270.000.000	
				2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala					
12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	DPMPPTSP		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				270.000.000	

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	KINERJA	INDIKATOR	TARGET	RENCANA PEMENUHAN DAN SUMBER DANA			Keterangan
						APBN	APBD PROV.	APBD KAB.	
41	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	DPMPPTSP	Terselesaikannya Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dapat diselesaikannya permasalahan dan hambatan dalam merealisasikan kegiatan usahanya	5 Kegiatan Usaha	-	-	70.000.000	
42	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPPTSP	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan teknis	50 Pelaku Usaha	-	-	100.000.000	
43	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPPTSP	Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pengawasan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha	-	-	100.000.000	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPPTSP		Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				90.000.000	
13	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	DPMPPTSP		Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota				90.000.000	
44	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPPTSP	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	-	-	90.000.000	
			JUMLAH			-	-	7.609.902.600	



TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN KETAPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KETAPANG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu 2021	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi	30.201.900.000,00	0	5.749.121.373,00	5.011.991.272,00	87,18	7.972.593.761,00	12.984.585.033,00	42,99
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	389.000.000,00	0	106.000.000,00	102.546.844,00	96,74	77.000.000,00	179.546.844,00	46,16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.000.000,00	0	8.000.000,00	7.900.966,00	98,76	8.000.000,00	15.900.966,00	37,86
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	16.000.000,00	0	3.000.000,00	2.981.010,00	99,37	3.000.000,00	5.981.010,00	37,38
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	16.000.000,00	0	3.000.000,00	2.970.328,00	99,01	3.000.000,00	5.970.328,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	11.000.000,00	0	2.000.000,00	1.964.990,00	98,25	2.000.000,00	3.964.990,00	36,05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	130.000.000,00	0	25.000.000,00	23.828.700,00	95,31	25.000.000,00	48.828.700,00	37,56

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu 2021	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.000.000,00	0	65.000.000,00	62.900.850,00	96,77	36.000.000,00	98.900.850,00	56,84
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	22.094.000.000,00	0	4.327.112.948,00	3.644.942.635,00	84,23	4.156.443.761,00	7.801.386.396,00	35,31
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22.010.000.000,00	0	4.312.112.948,00	3.635.033.073,00	84,30	4.140.443.761,00	7.775.476.834,00	35,33
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.000.000,00	0	7.500.000,00	4.999.844,00	66,66	8.000.000,00	12.999.844,00	30,95
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	42.000.000,00	0	7.500.000,00	4.909.718,00	65,46	8.000.000,00	12.909.718,00	30,74
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			0	-	-	0,00	-	-	0,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu 2021	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	697.000.000,00	0	50.000.000,00	49.999.500,00	100,00	155.000.000,00	204.999.500,00	29,41
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-	3.000.000,00	42,86
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000,00	0	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	-	22.000.000,00	48,89
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	0	5.000.000,00	4.999.500,00	0,00	5.000.000,00	9.999.500,00	40,00
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	0	-	-	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	220.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00	70.000.000,00	31,82
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.755.000.000,00	0	467.999.316,00	467.786.532,00	99,95	445.000.000,00	912.786.532,00	52,01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu 2021	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35.000.000,00	0	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	10.000.000,00	27.000.000,00	77,14
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	720.000.000,00	0	138.999.316,00	138.947.063,00	99,96	150.000.000,00	288.947.063,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.000.000,00	0	50.000.000,00	49.999.690,00	100,00	35.000.000,00	84.999.690,00	85,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.000.000,00	0	262.000.000,00	261.839.779,00	99,94	250.000.000,00	511.839.779,00	56,87
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	2.180.000.000,00	0	224.209.109,00	216.986.972,00	96,78	1.865.531.600,00	2.082.518.572,00	95,53
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	950.000.000,00	0	-	-	0,00	-	-	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30.000.000,00	0	63.000.000,00	62.856.000,00	99,77	500.000.000,00	562.856.000,00	1876,19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	950.000.000,00	0	128.400.109,00	126.007.422,00	98,14	180.531.600,00	306.539.022,00	32,27
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	250.000.000,00	0	32.809.000,00	28.123.550,00	85,72	1.185.000.000,00	1.213.123.550,00	485,25
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.195.000.000,00	0	414.800.000,00	370.975.548,00	89,43	795.800.000,00	1.166.775.548,00	53,16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	0	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	5.000.000,00	9.000.000,00	36,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu 2021	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	640.000.000,00	0	154.000.000,00	116.975.548,00	75,96	500.000.000,00	616.975.548,00	96,40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.530.000.000,00	0	256.800.000,00	250.000.000,00	97,35	290.800.000,00	540.800.000,00	35,35
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	891.900.000,00	0	159.000.000,00	158.753.241,00	99,84	477.818.400,00	636.571.641,00	71,37
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	240.000.000,00	0	55.000.000,00	54.942.641,00	99,90	104.668.400,00	159.611.041,00	66,50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26.900.000,00	0	4.000.000,00	3.886.600,00	97,17	3.900.000,00	7.786.600,00	0,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500.000.000,00	0	80.000.000,00	79.924.000,00	99,91	344.250.000,00	424.174.000,00	84,83
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	0	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	15.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	50.000.000,00	0	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan	1.740.580.808,00	0	263.394.500,00	257.872.080,00	97,90	386.072.000,00	643.944.080,00	-
Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal	650.580.808,00	0	45.987.000,00	45.945.500,00	99,91	111.552.000,00	157.497.500,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu 2021	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	329.414.080,00	0	45.987.000,00	45.945.500,00	99,91	60.000.000,00	105.945.500,00	32,16
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	321.166.728,00	0	24.200.000,00	24.186.960,00	99,95	51.552.000,00	75.738.960,00	0,00
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi	1.090.000.000,00	0	217.407.500,00	211.926.580,00	97,48	274.520.000,00	486.446.580,00	0,00
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	520.000.000,00	0	115.924.000,00	110.617.630,00	95,42	164.520.000,00	275.137.630,00	52,91
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	570.000.000,00	0	101.483.500,00	101.308.950,00	0,00	110.000.000,00	211.308.950,00	0,00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah	6.285.430.694,00	0	331.976.375,00	330.505.635,00	99,56	696.790.000,00	1.027.295.635,00	16,34
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	6.285.430.694,00	0	331.976.375,00	330.505.635,00	99,56	696.790.000,00	1.027.295.635,00	0,00
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	1.120.000.000,00	0	55.300.000,00	55.046.420,00	99,54	110.000.000,00	165.046.420,00	14,74
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	5.165.430.694,00	0	276.676.375,00	275.459.215,00	0,00	586.790.000,00	862.249.215,00	0,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal	3.988.831.018,00	0	491.220.700,00	489.615.106,00	99,67	596.890.000,00	1.086.505.106,00	27,24

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu 2021	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu	3.988.831.018,00	0	491.220.700,00	489.615.106,00	99,67	596.890.000,00	1.086.505.106,00	0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu 2021	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.773.031.018,00	0	321.220.700,00	319.615.106,00	99,50	240.890.000,00	560.505.106,00	0,00
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1.230.000.000,00	0	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	215.000.000,00	385.000.000,00	31,30
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	795.800.000,00	0	-	-	#DIV/0!	141.000.000,00	141.000.000,00	17,72
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	190.000.000,00	0	-	-	0,00	176.000.000,00	176.000.000,00	92,63
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel	2.175.726.010,00	0	720.721.684,00	693.940.722,00	96,28	895.680.000,00	1.589.620.722,00	73,06
	2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala							-	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.175.726.010,00	0	665.721.684,00	639.342.361,00	96,04	793.740.000,00	1.433.082.361,00	65,87
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	520.726.010,00	0	55.000.000,00	54.598.361,00	99,27	101.940.000,00	156.538.361,00	0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu 2021	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	825.000.000,00	0	421.421.684,00	397.937.000,00	94,43	514.250.000,00	912.187.000,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	830.000.000,00	0	189.300.000,00	186.807.000,00	98,68	177.550.000,00	364.357.000,00	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	725.242.003,00	0	122.295.000,00	121.707.132,00	99,52	133.980.000,00	255.687.132,00	35,26
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota	725.242.003,00	0	122.295.000,00	121.707.132,00	99,52	133.980.000,00	255.687.132,00	0,00
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	725.242.003,00	0	122.295.000,00	121.707.132,00	99,52	133.980.000,00	255.687.132,00	35,26

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang



Drs. KARWANNOR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 200003 1 003

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi			4.716.607.649,00	5.889.900.000,00	5.879.000.000,00	6.212.000.000,00	4.452.767.518,00	5.016.865.962,00			
	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu			50.000.000,00	81.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	49.105.300,00	102.546.844,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.500.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.479.344,00	7.900.966,00			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.999.980,00	2.981.010,00			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-	-	-	-	-	-			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.875.436,00	2.970.328,00			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	999.536,00	1.964.990,00			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja			25.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	24.426.520,00	23.828.700,00			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.500.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	12.324.484,00	62.900.850,00			
	Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu			3.912.766.711,00	4.226.000.000,00	4.316.000.000,00	4.417.000.000,00	3.606.749.381,00	3.649.817.325,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			3.902.766.711,00	4.210.000.000,00	4.300.000.000,00	4.400.000.000,00	3.596.839.819,00	3.635.033.073,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-	-	-	-	-	-			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	4.999.844,00	7.303.210,00			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			-	-	-	-	-	-			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	4.909.718,00	7.481.042,00			

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			110.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	128.839.563,00	261.839.779,00			
	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			50.500.000,00	710.000.000,00	360.000.000,00	550.000.000,00	89.590.000,00	216.986.972,00			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	500.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	62.856.000,00			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			45.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	84.090.000,00	126.007.422,00			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	5.500.000,00	28.123.550,00			
	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			356.800.000,00	375.000.000,00	455.000.000,00	455.000.000,00	309.898.397,00	370.975.548,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			116.400.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	101.898.397,00	116.975.548,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			236.400.000,00	250.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	204.000.000,00	250.000.000,00			
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80.900.000,00	168.900.000,00	169.000.000,00	181.000.000,00	97.043.628,00	158.753.241,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00	41.768.928,00	54.942.641,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			3.900.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	3.611.200,00	3.886.600,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			20.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	29.999.500,00	79.924.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi			10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	14.744.000,00	10.000.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi			7.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	6.920.000,00	10.000.000,00			
	Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan			122.000.000,00	316.800.000,00	321.552.000,00	334.414.080,00	121.998.715,00	257.872.080,00			
	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal			60.000.000,00	116.800.000,00	111.552.000,00	124.414.080,00	59.999.115,00	45.945.500,00			
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	64.414.080,00	59.999.115,00	45.945.500,00			

	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah			-	56.800.000,00	51.552.000,00	60.000.000,00	-	24.186.960,00			
	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi			62.000.000,00	200.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	61.999.600,00	211.926.580,00			
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah			62.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	61.999.600,00	110.617.630,00			
	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			-	100.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-	101.308.950,00			
	Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah			60.000.000,00	1.144.000.000,00	1.161.160.000,00	1.207.606.400,00	59.998.979,00	330.505.635,00			
	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal			60.000.000,00	1.144.000.000,00	1.161.160.000,00	1.207.606.400,00	59.998.979,00	330.505.635,00			
	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan			60.000.000,00	200.000.000,00	210.000.000,00	220.000.000,00	59.998.979,00	55.046.420,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota			-	944.000.000,00	951.160.000,00	987.606.400,00	-	275.459.215,00			
	Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal			311.764.399,00	726.000.000,00	696.890.000,00	716.365.600,00	331.562.707,00	489.615.106,00			
	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu			311.764.399,00	726.000.000,00	696.890.000,00	716.365.600,00	331.562.707,00	489.615.106,00			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			90.493.399,00	332.200.000,00	340.890.000,00	350.365.600,00	90.408.917,00	319.615.106,00			
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			107.471.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	220.000.000,00	127.411.290,00	-			
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			113.800.000,00	178.800.000,00	141.000.000,00	146.000.000,00	113.742.500,00	170.000.000,00			
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			-	-	40.000.000,00	50.000.000,00	-	-			
	1.Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel			301.626.000,00	492.000.000,00	503.880.000,00	521.035.200,00	443.765.725,00	693.940.722,00			
	2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala											
	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			251.826.000,00	396.000.000,00	401.940.000,00	418.017.600,00	403.315.589,00	639.342.361,00			
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			49.800.000,00	96.000.000,00	101.940.000,00	103.017.600,00	40.450.136,00	54.598.361,00			

	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			102.426.000,00	150.000.000,00	150.000.000	155.000.000	273.132.953,00	397.937.000,00			
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			99.600.000,00	150.000.000,00	150.000.000	160.000.000	89.732.500,00	186.807.000,00			
	Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			83.574.000,00	132.000.000,00	133.980.000,00	139.339.200,00	84.869.941,00	121.707.132,00			
	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota			83.574.000,00	132.000.000,00	133.980.000,00	139.339.200,00	84.869.941,00	121.707.132,00			
	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			83.574.000,00	132.000.000,00	133.980.000,00	139.339.200,00	84.869.941,00	121.707.132,00			



TABEL 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi	Ketapang	100	6.276.202.080,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi	Ketapang	100	5.870.902.600,00
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	Ketapang	100	107.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	Ketapang	100	76.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketapang	100	8.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketapang	100	8.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketapang	100	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketapang	100	3.000.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ketapang		-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ketapang		-
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ketapang	100	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ketapang	100	3.000.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ketapang	100	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ketapang	100	2.000.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketapang	100	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketapang	100	25.000.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketapang	100	66.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketapang	100	35.000.000,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	Ketapang	100	4.307.802.080,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	Ketapang	100	4.533.502.600,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ketapang	100	4.291.802.080,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ketapang	100	4.517.502.600,00
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ketapang	100	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ketapang	100	-

10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketapang	100	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketapang	100	8.000.000,00
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Ketapang	100	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Ketapang	100	-
12	Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Ketapang	100	8.000.000,00	Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Ketapang	100	8.000.000,00
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ketapang	100	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ketapang	100	-
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Ketapang	100		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Ketapang	100	
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang	100		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang	100	
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang	100		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang	100	
16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang	100		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang	100	
17	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketapang	100		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketapang	100	
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketapang	100		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketapang	100	
19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketapang	100		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketapang	100	
20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang	100		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang	100	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketapang	100	105.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketapang	100	35.000.000,00
21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Ketapang	100	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Ketapang	100	-
22	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ketapang	100	50.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ketapang	100	-
23	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ketapang	100	5.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ketapang	100	5.000.000,00
24	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketapang	100	-	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketapang	100	-

25	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketapang	100	50.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketapang	100	30.000.000,00
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketapang	100	495.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketapang	100	385.000.000,00
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	15.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	15.000.000,00
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	150.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	90.000.000,00
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Ketapang	100	30.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Ketapang	100	30.000.000,00
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ketapang	100	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ketapang	100	-
30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketapang	100	300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketapang	100	250.000.000,00
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Ketapang	100	450.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Ketapang	100	160.000.000,00
31	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ketapang	100	150.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ketapang	100	-
32	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ketapang	100	100.000.000,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ketapang	100	60.000.000,00
33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	100	150.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	100	70.000.000,00
34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	100	50.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	100	30.000.000,00
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketapang	100	577.400.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketapang	100	503.400.000,00
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketapang	100	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketapang	100	3.000.000,00
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ketapang	100	200.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ketapang	100	200.000.000,00
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	372.400.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	300.400.000,00
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketapang	100	234.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketapang	100	178.000.000,00

38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ketapang	100	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ketapang	100	100.000.000,00
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ketapang	100	4.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ketapang	100	4.000.000,00
40	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	100	100.000.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	100	50.000.000,00
41	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	100	15.000.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	100	15.000.000,00
42	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Ketapang	100	15.000.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Ketapang	100	9.000.000,00
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan	Ketapang	100	335.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan	Ketapang	100	239.000.000,00
IX	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal	Ketapang	100	125.000.000,00	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal	Ketapang	100	89.000.000,00
43	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ketapang	100	65.000.000,00	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ketapang	100	39.000.000,00
44	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	60.000.000,00	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	50.000.000,00
X	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi	Ketapang	100	210.000.000,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi	Ketapang	100	150.000.000,00
45	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	100.000.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	70.000.000,00
46	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Ketapang	100	110.000.000,00	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Ketapang	100	80.000.000,00
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah	Ketapang	100	1.207.606.400,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah	Ketapang	100	710.000.000,00
XI	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Ketapang	100	1.207.606.400,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Ketapang	100	710.000.000,00
47	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Ketapang	100	220.000.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Ketapang	100	110.000.000,00

48	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Ketapang	100	987.606.400,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Ketapang	100	600.000.000,00
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal	Ketapang	100	766.000.000,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal	Ketapang	100	430.000.000,00
XII	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu	Ketapang	100	766.000.000,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu	Ketapang	100	430.000.000,00
49	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ketapang	100	350.000.000,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ketapang	100	150.000.000,00
50	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ketapang	100	220.000.000,00	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ketapang	100	150.000.000,00
51	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ketapang	100	146.000.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ketapang	100	100.000.000,00
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Ketapang	100	50.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Ketapang	100	30.000.000,00

E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel	Ketapang	100	410.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1. Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel	Ketapang	100	270.000.000,00
		2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala	Ketapang	100	-		2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala	Ketapang	100	-
XIII	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Ketapang	100	410.000.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Ketapang	100	270.000.000,00
53	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dapat diselesaikannya Permasalahan dan Hambatan dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Ketapang	100	110.000.000,00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dapat diselesaikannya Permasalahan dan Hambatan dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Ketapang	100	70.000.000,00
54	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Ketapang	100	150.000.000,00	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Ketapang	100	100.000.000,00
55	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pengawasan Penanaman Modal	Ketapang	100	150.000.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pengawasan Penanaman Modal	Ketapang	100	100.000.000,00
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Ketapang	100	140.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Ketapang	100	90.000.000,00
XIV	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	140.000.000,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	90.000.000,00
56	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Ketapang	100	140.000.000,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Ketapang	100	90.000.000,00

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Ketapang



Des. HARWANNOR, MM
 Kepala Utama Muda
 NIP. 19670427 200003 1 003

TABEL 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				Usulan Musrenbang lewat pokok-pokok pikiran anggota DPRD

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Ketapang



Drs. HARWANNOR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 200003 1 003

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Realisasi Investasi PMDN / PMA	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi PMDN / PMA	48,41%	2,75%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	meningkatnya Pelayanan Perizinan Sesuai Standar Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	98,61%	92,00%
3	Nilai RB DPMPTSP	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai RB DPMPTSP Menjadi Lebih Baik	28,72	26

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang



Drs. MARWANNOR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670427 200003 1 003

TABEL 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub. Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	TAHUN 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi	Ketapang	100	5.870.902.600,00	APBD		100	6.117.500.000,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	Ketapang	100	76.000.000,00	APBD		100	77.000.000,00
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketapang	100	8.000.000,00	APBD		100	8.000.000,00
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketapang	100	3.000.000,00	APBD		100	3.000.000,00
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ketapang		-	APBD			-
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ketapang	100	3.000.000,00	APBD		100	3.000.000,00
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ketapang	100	2.000.000,00	APBD		100	2.000.000,00
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketapang	100	25.000.000,00	APBD		100	25.000.000,00
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketapang	100	35.000.000,00	APBD		100	36.000.000,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	Ketapang	100	4.533.502.600,00	APBD		100	4.517.000.000,00
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ketapang	100	4.517.502.600,00	APBD		100	4.500.000.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ketapang	100	-	APBD		100	-

2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketapang	100	8.000.000,00	APBD		100	8.500.000,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Ketapang	100	-	APBD		100	-
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Ketapang	100	8.000.000,00	APBD		100	8.500.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ketapang		-				-
2.18.01.2.04	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Ketapang						
2.18.01.2.04.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang						-
2.18.01.2.04.01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang						-
2.18.01.2.04.02	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang						-
2.18.01.2.04.03	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketapang						-
2.18.01.2.04.04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketapang						-
2.18.01.2.04.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ketapang						-
2.18.01.2.04.06	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Ketapang						-
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Ketapang	100	35.000.000,00	APBD		100	155.000.000,00
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Ketapang						-
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ketapang	100	-	APBD		100	-
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ketapang	100	5.000.000,00	APBD		100	5.000.000,00
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketapang	100	-	APBD		100	100.000.000,00

2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketapang	100	30.000.000,00	APBD		100	50.000.000,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketapang	100	385.000.000,00	APBD		100	377.000.000,00
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	15.000.000,00	APBD		100	7.000.000,00
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	90.000.000,00	APBD		100	150.000.000,00
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Ketapang	100	30.000.000,00	APBD		100	20.000.000,00
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ketapang		-				-
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketapang	100	250.000.000,00	APBD		100	200.000.000,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Ketapang	100	160.000.000,00	APBD		100	350.000.000,00
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ketapang	100	-	APBD		100	150.000.000,00
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ketapang	100	60.000.000,00	APBD		100	-
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	100	70.000.000,00	APBD		100	150.000.000,00
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	100	30.000.000,00	APBD		100	50.000.000,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketapang	100	503.400.000,00	APBD		100	455.000.000,00
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketapang	100	3.000.000,00	APBD		100	5.000.000,00
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ketapang	100	200.000.000,00	APBD		100	130.000.000,00
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	300.400.000,00	APBD		100	320.000.000,00

2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketapang	100	178.000.000,00	APBD		100	186.500.000,00
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ketapang	100	100.000.000,00	APBD		100	55.000.000,00
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ketapang	100	4.000.000,00	APBD		100	6.500.000,00
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	100	50.000.000,00	APBD		100	100.000.000,00
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	100	15.000.000,00	APBD		100	15.000.000,00
2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Ketapang	100	9.000.000,00	APBD		100	10.000.000,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan	Ketapang	100	239.000.000,00	APBD		100	374.543.770,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal	Ketapang	100	89.000.000,00	APBD		100	144.543.770,00
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ketapang	100	39.000.000,00	APBD		100	70.000.000,00
2.18.02.2.01.02	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	50.000.000,00	APBD		100	74.543.770,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi	Ketapang	100	150.000.000,00	APBD		100	230.000.000,00
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	70.000.000,00	APBD		100	110.000.000,00
2.18.02.2.02.02	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Ketapang	100	80.000.000,00	APBD		100	120.000.000,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah	Ketapang	100	710.000.000,00	APBD		100	1.352.519.168,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Ketapang	100	710.000.000,00	APBD		100	1.352.519.168,00

2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Ketapang	100	110.000.000,00	APBD		100	240.000.000,00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Ketapang	100	600.000.000,00	APBD		100	1.112.519.168,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal	Ketapang	100	430.000.000,00	APBD		100	808.329.472,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu	Ketapang	100	430.000.000,00	APBD		100	808.329.472,00
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Ketapang	100	150.000.000,00	APBD		100	368.329.472,00
2.18.04.2.01.02	Pemantauan, Analisis , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ketapang	100	150.000.000,00	APBD		100	280.000.000,00
2.18.04.2.01.03	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ketapang	100	100.000.000,00	APBD		100	160.000.000,00
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Ketapang	100	30.000.000,00	APBD		100	50.000.000,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel	Ketapang	100	270.000.000,00	APBD		100	576.359.424,00
		2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala	Ketapang						
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Ketapang	100	270.000.000,00	APBD		100	468.179.712,00
2.18.05.2.01.01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dapat diselesaikannya Permasalahan dan Hambatan dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Ketapang	100	70.000.000,00	APBD		100	108.179.712,00
2.18.05.2.01.02	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Ketapang	100	100.000.000,00	APBD		100	180.000.000,00
2.18.05.2.01.03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pengawasan Penanaman Modal	Ketapang	100	100.000.000,00	APBD		100	180.000.000,00

2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Ketapang	100	90.000.000,00	APBD		100	156.059.904,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	90.000.000,00	APBD		100	156.059.904,00
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Ketapang	100	90.000.000,00	APBD		100	156.059.904,00

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ketapang



Des. MARWANNOR, MM
Pegawai Utama Muda
NIP. 19670427 200003 1 003